

Strategi TNI dalam Mengatasi Faham Terorisme Organisasi Papua Merdeka di Kalangan Akademisi guna Mencegah Disintegrasi Bangsa

Irfan Amir

Irfan_amir@gmail.com

Universitas Pertahanan

Abstrak. Perkembangan ancaman ideologis di Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran faham terorisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi terbatas pada aktivitas bersenjata, tetapi telah merambah ke lingkungan akademik melalui media sosial, forum ilmiah, dan jaringan internasional. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ideologi dan potensi disintegrasi bangsa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas propaganda OPM di kalangan akademisi yang memanfaatkan isu hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri untuk memengaruhi opini publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi TNI dalam mengatasi penyebaran faham terorisme OPM di kalangan akademisi guna mencegah disintegrasi bangsa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen dari berbagai informan kunci yang terdiri atas unsur TNI, akademisi, dan aparat penegak hukum. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan *Fishbone Analysis* untuk mengidentifikasi akar masalah dan *SWOT Analysis* untuk merumuskan strategi. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama yang dihadapi TNI, yaitu: lemahnya pengawasan akademik terhadap infiltrasi ideologi terorisme, belum optimalnya strategi kontra-propaganda digital dalam menghadapi narasi terorisme berbasis media sosial, serta belum terbangunnya koordinasi efektif antara TNI, Kementerian Pendidikan, dan aparat penegak hukum. Strategi yang efektif meliputi penguatan pembinaan wawasan kebangsaan di perguruan tinggi, pelaksanaan operasi informasi dan operasi psikologis untuk melawan narasi terorisme, serta pengembangan model koordinasi lintas lembaga berbasis operasi gabungan non-kinetik. Implementasi strategi tersebut diharapkan memperkuat ketahanan nasional, mencegah disintegrasi bangsa, dan meningkatkan efektivitas peran TNI dalam kampanye militer non-kinetik menghadapi ancaman terorisme modern.

Kata Kunci: Strategi TNI, Terorisme, OPM, Akademisi, Disintegrasi Bangsa.

Abstract. The development of ideological threats in Indonesia shows that the spread of the terrorism ideology promoted by the Organisasi Papua Merdeka (OPM) is no longer confined to armed movements but has expanded into academic environments through social media, scientific forums, and international networks. This condition poses a serious threat to ideological resilience and national unity. The study is motivated by the increasing propaganda activities of OPM among academics, exploiting human rights and self-determination issues to influence public opinion both domestically and globally. The objective of this research is to analyze the TNI's strategy in countering the spread of OPM's terrorism ideology among academics to prevent national disintegration. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving key informants from the TNI, academic institutions, and law enforcement agencies. Data were analyzed using an interactive qualitative analysis model, incorporating *Fishbone Analysis* to identify root causes and *SWOT Analysis* to formulate strategies. The results reveal three major problems faced by the TNI: weak academic supervision in preventing ideological infiltration, suboptimal digital counter-propaganda strategies against terrorism narratives on social media, and ineffective coordination among the TNI, the Ministry of Education, and law enforcement agencies. Effective strategies include strengthening national awareness programs in universities, conducting information and psychological operations to counter terrorism narratives, and developing cross-agency coordination models based on non-kinetic joint operations. The implementation of these strategies is expected to strengthen national resilience, prevent disintegration, and enhance the TNI's effectiveness in conducting non-kinetic military campaigns against modern terrorism threats.

Keywords: TNI Strategy, Terrorism, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Academics, National Disintegration.

1. Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional menunjukkan eskalasi ancaman yang semakin kompleks, saling terkait, dan multidimensi. Di tingkat global, persaingan kekuatan besar, konflik regional, serangan siber, dan propaganda transnasional menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Global Security Outlook, 2024). Dinamika geopolitik global diperkuat oleh kemajuan teknologi informasi yang mempercepat penyebaran radikalisme dan narasi ekstremisme melalui media digital, jaringan akademik internasional, dan kelompok diaspora. Fenomena ini menegaskan bahwa ancaman kontemporer tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis dan informasi, menjadikan domain kognitif dan siber sebagai arena strategis baru bagi pertahanan negara. Pada tingkat regional, kawasan Asia-Pasifik mencerminkan arena persaingan geopolitik intens, terutama di Laut Cina Selatan. Ketegangan terkait perebutan wilayah, perubahan aliansi strategis, serta pergerakan kelompok teroris lintas batas membentuk lanskap keamanan yang dinamis bagi Indonesia (ASEAN Regional Security Report, 2023). Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis, isu perbatasan dan kedaulatan tetap menjadi prioritas utama, terutama di wilayah-wilayah rawan infiltrasi dan penyelundupan senjata. Perkembangan regional ini menuntut kesiapsiagaan adaptif, integratif, dan responsif dari seluruh aparat pertahanan dan keamanan nasional. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi risiko disintegrasi, radikalisme, dan terorisme, khususnya yang terkait dengan isu Papua. Penyebaran paham terorisme kini mengoptimalkan media sosial, ruang akademik, serta forum daring sebagai saluran utama (BNPT, 2023; Kemendagri, 2024). Perubahan pola rekrutmen dan propaganda menunjukkan strategi kontemporer kelompok separatis dan teroris yang mengincar generasi muda, terutama mahasiswa dan civitas akademika. Faktor domestik seperti ketimpangan pembangunan, dislokasi sosial, hingga ketidaksesuaian kebijakan pusat dengan karakteristik lokal turut memperkuat potensi konflik (BIN, 2025).

Aksi Terorisme yang dilakukan KKB di Papua juga memperoleh dukungan dari aktor non-negara, akademisi, mahasiswa diaspora, dan komunitas internasional (Bachriadi, 2022; International Crisis Group, 2020). Beberapa universitas internasional menjadi kanal legitimasi narasi separatis sehingga memengaruhi persepsi global terhadap isu Papua (Elmslie, 2017). Pada saat yang sama, oligarki domestik di sektor sumber daya alam memperumit dinamika tata kelola pembangunan daerah, menciptakan ruang bagi eksploitasi isu sosial-politik oleh kelompok separatis (Aspinall & Berenschot, 2019). Advokasi HAM internasional dan intervensi diplomatik negara Pasifik seperti Vanuatu juga memperkuat legitimasi politik kelompok separatis di forum internasional (Pacific Islands Forum, 2023). Menanggapi eskalasi ancaman, Pemerintah Indonesia pada 29 April 2021 menetapkan OPM/KKB sebagai organisasi teroris sehingga mekanisme penanganannya mengacu pada UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kerangka OMSP (Mahfud MD, 2021). Landasan hukum pendukung lainnya antara lain UU No. 59/1958 terkait Konvensi Jenewa, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 3/2025 perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI, Peraturan Menhan No. 5/2011, dan Perpang TNI No. 81/2009 terkait pelaksanaan operasi penanggulangan terorisme. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi jelas bagi peran TNI dalam menghadapi ancaman terorisme yang memiliki dimensi domestik dan internasional.

Ancaman paham teroris OPM kini berkembang melalui kanal akademik, digital, dan jaringan internasional (BNPT, 2023; Kemendagri, 2024; BIN, 2025). Kampus menjadi target strategis karena perannya dalam pembentukan opini publik dan kader elit. Aktivitas digital terorisme meningkat 17% periode 2022–2024, dengan 23 kasus indoktrinasi di lingkungan akademik. Fenomena ini menciptakan situasi Das Sein berupa eskalasi penyebaran ideologi terorisme, sementara kondisi ideal (Das Sollen) menuntut sistem pengawasan, kontra-propaganda, dan koordinasi yang lebih kuat. Strategi TNI diarahkan pada operasi informasi, operasi teritorial, dan operasi psikologis yang terintegrasi dengan institusi

pendidikan, pemerintah pusat-daerah, serta penegak hukum. Pendekatan ini bertujuan membangun ketahanan ideologi, memperkuat wawasan kebangsaan, dan melumpuhkan propaganda pro-terorisme di ruang akademik. Data BIN (2025) menunjukkan lebih dari 30% propaganda terorisme OPM tersebar melalui media sosial dan lingkungan akademik dengan narasi HAM dan self-determination sebagai strategi utama. BNPT (2023) mencatat meningkatnya infiltrasi digital dan organisasi mahasiswa tertentu, sedangkan Kemendagri (2024) mencatat kenaikan 17% aktivitas digital terorisme terutama di Papua dan Maluku.

Permasalahan strategis yang dihadapi mencakup: Minimnya pengawasan ruang akademik 27% mahasiswa terpapar radikalisme, dan 80% diskusi akademik isu terorisme tidak diawasi (BIN, 2024; Puskamnas UI); Lemahnya kontra-propaganda digital, dari 12.000 konten terorisme hanya 40% ditangani; 65% akun penyebar propaganda aktif lebih dari enam bulan sebelum teridentifikasi (Kominfo, 2024; CISSReC); Koordinasi lintas lembaga belum efektif hanya 35% kampus memiliki mekanisme pengawasan, kurang dari 50% kasus terorisme kampus direspons cepat (LIPI, 2023). Implikasinya signifikan terhadap ketahanan nasional. Lemhannas (2024) mencatat penurunan 8% skor ketahanan ideologi akibat meningkatnya propaganda terorisme. Kondisi ini mengancam Astacita Nasional, khususnya terkait persatuan bangsa dan stabilitas ideologi. Untuk itu, respons strategis harus adaptif melalui kombinasi pendekatan ofensif, defensif, dan operasi gabungan. Pendekatan ofensif mencakup penguasaan spektrum informasi, pembentukan narasi tandingan, operasi siber, dan pembongkaran jaringan informasi separatis. Pendekatan defensif fokus pada perlindungan institusi pendidikan, penanaman nilai kebangsaan, dan peningkatan ketahanan informasi. Operasi gabungan melibatkan TNI, Polri, BIN, Kemendikbud, dan elemen masyarakat sipil, menciptakan sinergi yang menyerupai koordinasi lintas matra dalam operasi militer. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi penguatan pengawasan akademik, pengembangan kontra-propaganda digital, dan integrasi sistem keamanan kampus berbasis intelijen. Perspektif kampanye militer memberi kerangka untuk mengadaptasi pola operasi informasi, operasi teritorial, dan operasi psikologis terhadap ancaman non-militer di ranah ideologi dan informasi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis ancaman digital OPM di lingkungan akademik dengan evaluasi efektivitas operasi TNI dan desain koordinasi lintas sektor berbasis model pertahanan semesta. Hasil penelitian diharapkan memperkuat peran TNI dalam menjaga integritas ideologi nasional, mencegah disintegrasi, dan mendukung pencapaian Astacita sebagai agenda pembangunan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kampanye Militer

Kampanye militer adalah penggunaan kekuatan secara terencana, terpadu, dan lintas matra untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah-panjang (Echevarria, 2017, hlm. 25). Dalam perkembangannya, kampanye modern tidak hanya mengandalkan kekuatan kinetik, tetapi juga operasi informasi, operasi psikologis, dan operasi teritorial guna menguasai narasi publik serta membangun dukungan rakyat (Gray, 2010, hlm. 45). Model operasi dapat bersifat ofensif, defensif, maupun gabungan dengan keterlibatan elemen sipil. Dalam konteks ancaman ideologi dan sosial, seperti penetrasi paham terorisme OPM di perguruan tinggi, kampanye militer diarahkan pada kontrol narasi informasi, kontra-propaganda digital, pembinaan wawasan kebangsaan, dan sinergi TNI-pemerintah-kampus-penegak hukum untuk memperkuat ketahanan ideologi nasional. Pendekatan ini termasuk OMSP/MOOTW dengan memadukan intelijen, operasi psikologi, dan pembinaan wilayah akademik. Landasan pelaksanaan merujuk pada Doktrin Tridek 2018, Keputusan Panglima TNI No. Kep/1059/XII/2020, serta UU No. 3/2025 tentang TNI yang memperluas cakupan kampanye militer dari OPM menjadi juga OMSP. Implementasinya terlihat pada penanganan terorisme OPM, yang menegaskan bahwa dimensi ideologi, politik, dan sosial budaya harus diintegrasikan dengan upaya kontra-narasi dan pencegahan infiltrasi ideologis demi menjaga persatuan bangsa dan mendukung Astacita Nasional (Panglima TNI, 2020; UU RI No.3/2025).

Teori Disintegrasi Bangsa.

Disintegrasi terjadi ketika negara gagal menjaga kesetaraan politik, keadilan sosial, integrasi budaya, dan legitimasi pemerintahan (Barry, 1983, hlm. 77). Dalam konteks Papua, penyebaran ideologi separatistis dan propaganda OPM memanfaatkan ketidakpuasan lokal, ketimpangan sosial, serta dukungan jejaring internasional (Hatta, 2019, hlm. 66). Ancaman modern didorong oleh ideologi transnasional, propaganda digital, dan intervensi asing (Nye, 2004, hlm. 30). Karena itu, mencegah disintegrasi tidak cukup dengan operasi bersenjata—perlu operasi informasi, operasi psikologis, pendidikan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi (Mas'ood, 2017, hlm. 92). Bagi TNI, teori ini menjadi pijakan untuk membangun ketahanan ideologi nasional serta meningkatkan legitimasi negara di daerah rawan melalui operasi non-kinetik dan dukungan OMSP.

Teori Hukum.

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma bertingkat yang validitasnya ditentukan oleh posisi dalam hierarki peraturan, bukan moral atau kekuasaan politik (Kelsen, 1960, hlm. 70). Dalam konteks pencegahan terorisme di lingkungan akademisi, pendekatan hukum menekankan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan HAM sesuai UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 43A–43G) dan UU No. 34/2004 terkait peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Prof. Jimly Asshidiqie menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances* dalam menangani ancaman terorisme, termasuk melalui edukasi hukum dan kolaborasi antar-institusi (Asshidiqie, 2020, hlm. 115–118). Dalam praktik, strategi TNI menghadapi infiltrasi paham OPM di akademisi harus berbasis hukum, proporsional, dan persuasif, bukan represif. Sinergi TNI, Polri, BNPT, dan perguruan tinggi melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme 2020–2024 (Perpres No. 7/2021) diterapkan untuk pencegahan, kontra-narasi ideologi, dan penguatan kesadaran kebangsaan. Dengan demikian, teori hukum menegaskan bahwa langkah penanggulangan terorisme harus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan akademik, sehingga mencegah disintegrasi bangsa secara profesional dan berbasis regulasi.

Teori Konflik Sosial

Konflik muncul karena ketidakpuasan kelompok terhadap sistem; jika tak dikelola, dapat berkembang menjadi terorisme (Coser, 1956, hlm. 45). Di kampus, radikalisme menuntut pendekatan persuasif, dialog, dan kontra-narasi yang lebih efektif daripada tindakan represif semata. Dalam kampanye militer, TNI harus mengintegrasikan operasi informasi, pembinaan teritorial, dan edukasi kewarganegaraan. Pendekatan ini mencegah eskalasi konflik menjadi ancaman pertahanan, serta mendukung stabilitas nasional untuk mencapai Astacita melalui integrasi fungsi ofensif, defensif, dan operasi gabungan non-kinetik.

Teori Strategi Lykke (*Ends–Ways–Means*).

Strategi efektif menuntut keseimbangan tujuan, cara, dan sumber daya (Lykke, 1989, hlm. 25). **Ends:** cegah pengaruh terorisme di kampus; **Ways:** kontra-narasi digital, edukasi kebangsaan, kolaborasi TNI–kampus–mahasiswa; **Means:** media sosial, intelijen, dan kerja sama dengan Kemendikbud serta aparat hukum. Konsep ini sejalan dengan MOOTW, memastikan kampanye militer berjalan terstruktur dan adaptif tanpa menimbulkan resistensi di dunia akademik.

Teori Pengawasan (*Surveillance*)

Pengawasan sosial mencegah penyebaran ideologi berbahaya melalui pemantauan perilaku dan hubungan sosial (Foucault, 1975, hlm. 195). TNI dapat menerapkan intelijen non-militer, monitoring digital, dan koordinasi kampus sambil tetap menjaga kebebasan akademik—membentuk sistem pengamanan preventif terhadap infiltrasi ideologi separatistis.

Teori Kontra-Propaganda Digital

Kontra-propaganda harus berbasis fakta, kredibilitas, dan persuasivitas (Jowett & O'Donnell, 2012, hlm. 32). Upaya TNI meliputi narasi kebangsaan, pemanfaatan akademisi dan influencer, literasi digital,

serta monitoring media daring. Pendekatan ini memperkuat operasi informasi dan operasi psikologis dalam mendukung pertahanan non-kinetik.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena penyebaran paham terorisme OPM di lingkungan akademisi serta strategi TNI dalam mengatasinya melalui pendekatan non-kinetik dan kontra-propaganda digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali perspektif, pengalaman, serta dinamika sosial-psikologis yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah interview (wawancara) dan observasi, dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, literatur akademik, serta publikasi digital terkait aktivitas propaganda OPM. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam dari informan kunci, seperti akademisi, perwira TNI, aparat keamanan, serta analis keamanan digital. Pengolahan data dilakukan melalui proses pengumpulan data, dimana data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang relevan. Setelah data terkumpul, peneliti akan memproses data tersebut dengan cara transkripsi wawancara dan penyusunan catatan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi: pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan menggunakan wawancara dan observasi; dalam pengolahan data, data yang terkumpul akan dikategorikan dan diorganisir berdasarkan tema yang muncul dari wawancara dan observasi.

Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan memfokuskan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian, termasuk indikasi penyebaran radikalisme akademik, pola narasi propaganda OPM di ruang digital, serta pendekatan TNI dalam menghadapi fenomena tersebut. Penyajian data (*data display*) kemudian dilakukan dalam bentuk matriks tematik, kutipan wawancara, dan pemetaan temuan untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan memeriksa konsistensi pola, hubungan antar temuan, dan validitas interpretasi melalui triangulasi sumber data. Selanjutnya digunakan analisis *Fishbone* dan SWOT untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor strategis internal dan eksternal, serta merumuskan rekomendasi strategi operasional TNI dalam mencegah infiltrasi paham terorisme di lingkungan akademik dan memperkuat kontra-propaganda digital dalam kerangka pertahanan negara.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian.

Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa strategi TNI dalam mencegah penyebaran paham terorisme OPM di lingkungan akademik mengalami penguatan pada aspek pengawasan, kontra-propaganda digital, dan koordinasi antarlembaga. Meski demikian, implementasi strategi masih menghadapi tantangan, terutama terkait resistensi civitas akademika, keterbatasan penetrasi intelijen di komunitas mahasiswa Papua, serta dinamika penyebaran ideologi di ruang digital kampus. Pengawasan ideologi di kampus masih terbatas karena adanya sensitivitas isu kebebasan akademik, minimnya dukungan struktur kampus, dan kurangnya sistem deteksi dini. Di sisi lain, strategi kontra-narasi digital mulai berkembang melalui pemantauan media sosial dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan, namun belum cukup menjangkau komunitas sasaran secara efektif. Koordinasi antara TNI, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem nasional yang permanen dan berbasis protokol bersama.

Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyebaran Paham Terorisme OPM di Perguruan Tinggi.

Temuan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyebaran ideologi separatis di perguruan tinggi masih menghadapi hambatan kultural dan struktural. Pendekatan intelijen yang bersifat tertutup dan keterbatasan pemahaman di lingkungan kampus menyebabkan proses pemantauan belum optimal. Resistensi kampus terhadap intervensi keamanan semakin memperkuat ruang gerak kelompok terpapar ideologi separatis. Diperlukan model pengawasan kolaboratif dengan melibatkan pihak kampus, tokoh akademik, dan organisasi mahasiswa, serta penguatan literasi kebangsaan melalui program pembinaan ideologi secara berkelanjutan. Pengembangan sistem pelaporan internal, pemetaan sosial organisasi

mahasiswa, dan pembentukan tim terpadu di lingkungan perguruan tinggi menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini.

Strategi Kontra-Propaganda Di Dunia Digital dalam Menangkal Penyebaran Ideologi Terorisme OPM

Strategi kontra-propaganda digital telah diterapkan melalui pemantauan media sosial, penggunaan algoritma deteksi konten radikal, dan penyebaran narasi kebangsaan di platform digital. Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh minimnya konten yang disesuaikan dengan karakter budaya Papua dan dinamika mahasiswa di kampus. Pelibatan akademisi, influencer lokal, dan komunitas digital kampus dinilai mampu meningkatkan kepercayaan sasaran dan memperluas jangkauan pesan. Penguatan algoritma, penyediaan konten berbasis bahasa lokal, dan pelatihan tim sukarelawan digital kampus menjadi rekomendasi strategis dalam meningkatkan daya tangkal propaganda separatistis di ruang media sosial.

Koordinasi antara TNI, Kementerian Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah Penyebaran Paham Terorisme OPM di Lingkungan Akademik.

Koordinasi antara TNI, BIN, Kementerian Pendidikan, dan aparat penegak hukum telah berjalan melalui forum komunikasi dan pertukaran data strategis, tetapi masih bersifat sektoral dan belum tersinkronisasi dalam mekanisme terpadu nasional. Pelaksanaan koordinasi di tingkat lapangan menunjukkan pola kerja sama yang tidak konsisten dan belum memiliki payung hukum yang kuat. Dibutuhkan penguatan SOP bersama, pembentukan pusat koordinasi intelijen pendidikan tinggi, dan satgas lintas lembaga untuk penanganan gangguan ideologi di kampus. Harmonisasi peran lembaga keamanan, kementerian pendidikan, dan pihak kampus menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan ideologi nasional di lingkungan akademik.

Dari uraian-uraian hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap para informan sebagaimana tersebut di atas, terungkap bahwa upaya TNI dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham terorisme OPM di lingkungan akademik telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan sistem pengawasan, pengembangan strategi kontra-propaganda digital, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan akses ke komunitas kampus, resistensi terhadap pendekatan keamanan, serta belum optimalnya integrasi lintas institusi dalam kerangka kebijakan yang komprehensif. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih adaptif, berbasis pemetaan sosial, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran aktif civitas akademika dalam memperkuat ketahanan ideologi di perguruan tinggi.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti menginterpretasikan temuan penelitian tentang efektivitas koordinasi antara TNI, Kementerian Pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam mencegah infiltrasi ideologi terorisme di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian mengidentifikasi dinamika sinergi kelembagaan, implementasi pengawasan ideologis, dan strategi kontra-propaganda digital sebagai elemen utama pencegahan. Temuan ini dipahami melalui kerangka teori kampanye militer non-kinetik, teori disintegrasi bangsa, teori Hukum, teori konflik sosial, teori koordinasi organisasi, teori *soft power*, serta pendekatan Lykke (*ends-ways-means*). Secara umum, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas pencegahan terorisme di kampus belum optimal akibat lemahnya deteksi dini, fragmentasi kebijakan, literasi digital yang belum merata, serta keterbatasan peran aktif sivitas akademika. Namun, terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem keamanan kampus melalui kolaborasi multi-aktor, pemanfaatan teknologi digital berbasis intelijen sosial, serta strategi komunikasi publik yang adaptif dan persuasif.

Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyebaran Ideologi Terorisme di Perguruan Tinggi.

Pengawasan terhadap penyebaran ideologi terorisme di lingkungan perguruan tinggi pada dasarnya telah berjalan, namun belum efektif secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan adanya tiga tantangan utama, yaitu lemahnya sistem deteksi dini, keterlibatan kampus dan aparat keamanan yang belum optimal, serta tidak seragamnya mekanisme koordinasi dan SOP antar-aktor terkait. Kondisi ini menciptakan pola pengawasan yang bersifat sektoral, reaktif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

pertahanan total (Sishankamrata) yang menekankan kesatuan peran antara pemerintah, aparat keamanan, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil. Dalam perspektif teori, pendekatan kampanye militer non-kinetik menggarisbawahi pentingnya intelijen sosial dan operasi pengamanan berbasis masyarakat kampus. Teori disintegrasi bangsa memperingatkan risiko fragmentasi identitas mahasiswa ketika pengawasan ideologis berjalan parsial dan tidak adaptif terhadap dinamika ruang akademik. Selain itu, model keseimbangan strategi Lykke menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sumber daya (*means*) menjadi faktor pembatas dalam efektivitas pengawasan tersebut.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kegagalan deteksi dini terkait dengan lemahnya sistem intelijen sosial di lingkungan kampus, di mana saluran pelaporan informal tidak terstruktur dan ruang interaksi tertutup dalam organisasi mahasiswa radikal tidak terjangkau. Selain itu, sikap sebagian institusi perguruan tinggi yang cenderung pasif karena kekhawatiran melanggar prinsip kebebasan akademik menyebabkan keterlambatan tindakan preventif. Ketidakterpaduan antar-institusi akibat belum adanya forum koordinasi tetap serta SOP yang seragam juga menyebabkan respons yang tidak terstandar ketika indikasi radikalisme muncul. Jika ditinjau dengan pendekatan SWOT, kekuatan utama terletak pada adanya payung hukum, kapasitas dosen, dan unit keamanan kampus. Akan tetapi, kelemahan signifikan berupa sistem deteksi yang lemah, resistensi terhadap intervensi keamanan karena otonomi kampus, serta koordinasi terbatas memperlambat respons. Peluang muncul melalui pengembangan program bela negara akademik dan pemanfaatan teknologi monitoring digital, namun ancaman tetap besar akibat penyebaran propaganda radikal daring, narasi ketidakadilan, dan celah literasi mahasiswa.

Oleh karena itu, strategi kebijakan diarahkan pada penguatan sistem deteksi dini berbasis sosial-digital melalui pemanfaatan OSINT, analitik medsos, dan pembentukan satgas bersama kampus-TNI-BNPT-Kemendikbud. Implementasi program “Kampus Kebangsaan” yang mengintegrasikan kurikulum wawasan kebangsaan dan penguatan kapasitas dosen sebagai penjaga nilai ideologi negara perlu berjalan simultan dengan pembentukan forum koordinasi Tri Dharma-aparat keamanan secara berkala untuk memastikan keseragaman penanganan indikasi radikalisme. Secara operasional, mekanisme whistleblowing anonim, penyediaan konseling ideologi, pelatihan intelijen sosial bagi BEM dan satuan keamanan kampus, serta sertifikasi duta ideologi mahasiswa menjadi langkah implementatif yang diharapkan mampu mewujudkan lingkungan akademik yang waspada, adaptif, partisipatif, dan tidak represif terhadap dinamika kebebasan berpikir ilmiah.

Strategi Kontra-Propaganda di Dunia Digital dalam Menangkal Penyebaran Paham Terorisme OPM.

Dalam konteks perang informasi dan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital, strategi kontra-propaganda yang dilaksanakan pemerintah, TNI, dan institusi pendidikan telah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah hambatan. Penelitian menemukan bahwa ketidakmerataan infrastruktur digital, kemampuan adaptasi propaganda lawan yang cepat, rendahnya literasi digital kritis pada sebagian mahasiswa, serta inkonsistensi koordinasi antar-lembaga menjadi kendala utama. Berdasarkan perspektif teori *soft power*, pendekatan persuasif dan edukatif lebih efektif dalam membangun daya tangkal ideologis mahasiswa dibanding pendekatan koersif. Sejalan dengan pemikiran Foucault, pengawasan dan intervensi digital harus proporsional agar tidak menciptakan kesan pengekan ruang akademik. Teori koordinasi multidisiplin juga menegaskan bahwa keberhasilan operasi kontra-propaganda memerlukan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, TNI, kampus, hingga komunitas digital.

Masalah utama terlihat pada ketidaksiapan teknologi kampus dan lembaga pendidikan dalam mengimbangi kemampuan propaganda berbasis algoritma dan otomasi digital kelompok ekstrem. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian mahasiswa mudah terpengaruh narasi agitasi berbasis sentimen ketidakadilan dan isu HAM. Jaringan influencer kebangsaan di lingkungan kampus juga belum terbangun secara sistemik sehingga kontra-narasi kurang mampu bersaing dengan pesan propaganda ekstrem yang dikemas secara emosional dan viral. Analisis SWOT mengindikasikan kekuatan terletak pada dukungan teknologi AI pemantau digital dan kolaborasi dengan TNI, sementara kelemahan mencakup ketidakmerataan infrastruktur dan kapasitas digital. Peluang strategis terbuka melalui pemanfaatan big data dan gerakan relawan siber, sedangkan ancaman berasal dari kemampuan penetrasi narasi ekstremis yang adaptif dan penggunaan framing HAM untuk menyerang kredibilitas negara.

Strategi yang diusulkan meliputi pengembangan platform anti-ekstremisme berbasis AI untuk mendeteksi pola propaganda, sistem *alert monitoring*, serta pelacakan jaringan narasi radikal. Pembentukan jaringan influencer kebangsaan kampus melalui pelibatan BEM, organisasi kemahasiswaan, dan tokoh digital muda merupakan langkah penting untuk memperkuat resonansi kontra-narasi. Program literasi digital dan ketahanan ideologi melalui modul “Cyber Patriot Campus” perlu diperluas dengan pendekatan edukatif, kreatif, dan dialogis. Secara operasional, pelaksanaan festival keamanan digital, pendirian laboratorium kontra-propaganda, produksi konten kreatif kebangsaan di media sosial, serta kemitraan dengan startup edtech dan komunitas patriot siber menjadi upaya nyata untuk memastikan mahasiswa tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai garda depan dalam membela ideologi negara di ruang digital.

Koordinasi antara TNI, Kementerian Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah Penyebaran Paham Terorisme OPM di Lingkungan Akademik.

Sinergi multi-aktor dalam pencegahan radikalisasi kampus menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan sistemik dan terstruktur. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa jalur komunikasi rutin belum terbentuk secara konsisten, SOP antara kampus dan aparat keamanan belum selaras, dan belum adanya persepsi ancaman yang seragam (*shared threat perception*) antar pihak terkait. Teori organisasi kompleks Thompson menegaskan bahwa semakin kompleks suatu lingkungan kebijakan, semakin besar kebutuhan terhadap mekanisme integrasi. Model *collaborative governance* juga menekankan pentingnya koordinasi horizontal antara institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor keamanan, serta koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keamanan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi kebijakan diarahkan pada pembentukan *National Academic Security Taskforce* yang melibatkan kampus, TNI, BNPT, Polri, dan Kemendikbud, serta penyusunan *Bluebook SOP Pencegahan Radikalisasi Kampus* sebagai pedoman operasional nasional. Di samping itu, implementasi *joint intelligence sharing mechanism* di lingkungan perguruan tinggi perlu diperkuat melalui forum koordinasi triwulanan antara rektorat, aparat keamanan, dan lembaga intelijen, serta pelaksanaan audit keamanan ideologi kampus secara periodik. Pembangunan *dashboard* pemantauan ancaman dan mekanisme respons cepat di tingkat kampus, serta penerapan kode etik pendanaan dan aktivitas organisasi mahasiswa menjadi langkah implementatif yang menegaskan komitmen tata kelola keamanan ideologi akademik yang berbasis kolaborasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, arah akhir yang diharapkan adalah terbentuknya ekosistem keamanan kampus yang berkelanjutan, mampu merespons ancaman secara adaptif, dan tetap menjunjung tinggi budaya akademik, kebebasan ilmiah, serta nilai demokrasi.

Secara keseluruhan, pencegahan terorisme di kampus tidak efektif bila hanya menitikberatkan aspek keamanan formal. Keberhasilan mensyaratkan integrasi *soft power*, sistem intelijen sosial-digital, literasi kebangsaan, serta partisipasi sivitas akademika dalam kerangka pertahanan negara modern yang humanis, edukatif, dan kolaboratif. Model yang relevan adalah “*Civil-Military Hybrid Ideological Security Framework*”, yakni sinergi kampus-TNI-Kementerian-masyarakat digital untuk membangun ketahanan ideologi berkelanjutan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengawasan terhadap penyebaran ideologi terorisme OPM masih belum optimal akibat lemahnya deteksi dini, keterlibatan kampus yang belum maksimal, serta minimnya koordinasi dan SOP terpadu antar lembaga keamanan dan pendidikan. Penguatan kolaborasi kampus-TNI-Polri, integrasi sistem *early warning* berbasis sosial-digital, serta kurikulum kebangsaan yang inklusif diperlukan untuk meningkatkan daya tangkal ideologi ekstrem di lingkungan akademik.

Upaya kontra-propaganda digital telah dilakukan, namun belum mampu mengimbangi kecepatan penyebaran narasi paham terorisme OPM. Diperlukan optimalisasi teknologi AI dan big data, penguatan literasi digital mahasiswa, serta pemanfaatan influencer edukatif dan relawan siber kampus sebagai garda terdepan. Pendekatan persuasif, kreatif, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk menarik segmentasi mahasiswa dan mendorong ketahanan ideologis yang mandiri.

Koordinasi antara TNI, Kementerian Pendidikan, dan aparat penegak hukum masih bersifat parsial, belum sistemik, dan belum memiliki mekanisme terpadu. Diperlukan kerangka hukum, SOP bersama, forum koordinasi berkala, serta satgas kolaboratif agar pengawasan dan pencegahan radikalisme dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan diterima lingkungan akademik tanpa menimbulkan resistensi terhadap kebebasan ilmiah.

Saran

Perlu disusun langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ideologi nasional dan meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran paham terorisme OPM di lingkungan perguruan tinggi. Bagi TNI, direkomendasikan untuk mendorong pembentukan lembaga koordinasi ketahanan ideologi nasional dan satuan tugas intelijen kampus guna memperkuat sistem deteksi dini, operasi informasi, serta pembinaan wawasan kebangsaan melalui pemanfaatan teknologi digital dan intelijen terbuka. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan diharapkan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai garda depan pembinaan ideologi dengan menyusun kurikulum kebangsaan yang komprehensif, membangun platform pemantauan konten digital berbasis big data yang dapat digunakan bersama oleh kampus dan aparat terkait, serta menetapkan regulasi koordinasi keamanan kampus yang tetap menghargai prinsip kebebasan akademik. Sementara itu, Polri perlu memperkuat kapasitas unit siber dan mekanisme pelaporan radikalisme kampus melalui pendekatan persuasif dan kolaboratif, sekaligus membangun pola pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan dini secara terpadu. Adapun akademisi dan mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam membangun budaya akademik kritis yang berlandaskan nilai kebangsaan dengan membentuk forum kajian ideologi, mengembangkan literasi digital, serta berpartisipasi sebagai duta digital kampus untuk menyebarkan narasi kebangsaan dan menanggapi propaganda ekstrem secara kreatif dan konstruktif. Melalui implementasi rekomendasi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan akan terbangun ekosistem pendidikan tinggi yang resilien, adaptif, dan mampu menghadirkan ruang akademik yang aman, produktif, dan bebas dari ancaman ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai negara dan Pancasila. Bagi penelitian berikutnya dapat difokuskan pada pengembangan strategi TNI yang terintegrasi dengan pendekatan pendidikan dan komunikasi untuk menangkal pengaruh ideologi OPM di kalangan akademisi, serta mengevaluasi efektivitas program kontra-radikalisme dan peran sivitas akademika dalam memperkuat kesadaran nasionalisme guna mencegah disintegrasi bangsa.

Daftar Pustaka

- Anandari, A. A. (2023). *Kepemimpinan strategis dalam menghadapi gerakan terorisme di Papua*. Universitas Pertahanan RI.
- Anderson, B. (2015). *Papua's insecurity: State failure in the Indonesian periphery*. East-West Center.
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Arkilaus, B. (2023). *Wakil rakyat Papua: DPRP dan DPRK jalur Otsus bertentangan dengan Pancasila*. Deklarator Dewan Rakyat Papua-DRP.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bachriadi, D. (2022). *Diaspora Papua dan politik identitas di luar negeri*. Penerbit Akar.
- Badan Intelijen Negara. (2024). *Laporan evaluasi ancaman paham terorisme di perguruan tinggi*. BIN.
- Badan Intelijen Negara. (2025). *Analisis ancaman terorisme nasional*. BIN.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Barry, B. (1983). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. Harvester Wheatsheaf.
- Barry, B. (1983). *Political argument*. University of California Press.
- Brown, M. (2023). *Countering terrorism propaganda in the digital age: Lessons from Ukraine*. Harvard University.

- CISSReC. (2023). *Tantangan keamanan siber dalam kontra-propaganda digital: Laporan tahunan*. CISSReC.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. The Free Press.
- David, M. (2021). *The role of academic institutions in terrorism movements: A case study of Catalonia*. University of Oxford.
- Echevarria, A. J. (2017). *Military strategy: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Elmslie, J. (2017). *The road to freedom: Papua and international academic networks*. ANU Press.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Global Security Outlook. (2024). *Annual report on global security challenges*. UNIDIR.
- Gray, C. S. (2010). *The strategy bridge: Theory for practice*. Oxford University Press.
- Hatta, M. (2019). *Disintegrasi bangsa dan strategi pertahanan nasional*. Rajawali Pers.
- Hatta, M. (2019). *Persatuan Indonesia dalam perspektif sejarah*. Balai Pustaka.
- Human Rights Watch. (2022). *Indonesia: Human rights concerns in Papua*. HRW.
- Huntington, S. P. (2004). *Who are we? The challenges to America's national identity*. Simon & Schuster.
- Hipdizah, S. A., Sigit Purwanto, S. I. P., Yermia Hendarwoto, S. H., Duarte, R. F., Ferdinan Siagian, S. T., & Han, M. (2025). *Buku ajar doktrin militer*. Yayasan Putra Adi Dharma
- International Crisis Group. (2020). *Indonesia: The Papua issue*. ICG.
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2012). *Propaganda & persuasion*. Sage Publications.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kaunang, E. S., Hadianto, M., & Purwanto, S. (2024). THE STRATEGIC, MILITARY AND COUNTERINSURGENCYTACTICS OF THE PERMESTA MOVEMENT (CASE STUDY GUERILLA WARFARE IN SULAWESI). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 4059-4076
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Evaluasi dinamika politik daerah Papua*. Kemendagri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Data pemantauan konten terorisme di media digital*. Kominfo.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2011 tentang kebijakan pertahanan negara dan tugas TNI dalam mengatasi terorisme*. Kemenhan RI.
- King, P. (2004). *West Papua and Indonesia since Suharto*. UNSW Press.
- Kukuh, A. N. (2023). *Analisis sejarah dan kontemporer gerakan terorisme di Indonesia*. Universitas Pertahanan RI.
- Kurnianto, T. A. (2022). *Upaya Indonesia mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik*. Universitas Pertahanan RI.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). *Laporan evaluasi nasional keamanan akademik*. LIPI.
- Lykke, A. F. Jr. (1989). *Toward an understanding of military strategy*. U.S. Army War College.
- Maharani, T. D. (2023). *Gerakan terorisme di Papua dan peran intelijen dalam penanggulangan ancaman*. Universitas Pertahanan RI.
- Mas'ood, M. (2017). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Gadjah Mada University Press.
- Mas'ood, M. (2017). *Politik global dan ketahanan nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Miller, D. (2021). *The role of academic institutions in terrorist movements: A case study of Catalonia*. University of Oxford.
- Mukhtadi. (2021). *Strategi pemerintah dalam penanganan gerakan terorisme Papua dan implikasinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia*. Universitas Pertahanan RI.
- Nye, J. S. Jr. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Pacific Islands Forum. (2023). *Regional security outlook and Papua issue*. PIF Secretariat.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

-
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Purwanto, S. (2026). IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE INFLUENCE OF PAPUA PROVINCE'S SPECIAL ALLOWANCE ON THE PERFORMANCE OF TNI-AD SOLDIERS/CIVIL SERVANTS IN THE OPERATIONAL AREA: Implementasi Kebijakan Pengaruh Tunjangan Khusus Provinsi Papua Terhadap Kinerja Prajurit/PNS TNI AD Di Daerah Operasi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 10(1), 261-272.
- Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).
- Prasetya, A. (2022). *Radikalisasi mahasiswa di Papua: Studi organisasi kemahasiswaan dan faham terorisme*. Universitas Gadjah Mada.
- Reeve, D. (2010). Terorisme and the struggle for independence in Papua. *Journal of Southeast Asian Studies*, 28(3), 451–470.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang TNI*. Sekretariat Negara.
- Sastrohandoyo, S. P. (2008). *Astacita: Cita-cita nasional dalam pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Sun Tzu. (2005). *The art of war*. Dover Publications.
- Susanto, N. (2021). *Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia: Studi kasus Papua*. Universitas Indonesia.
- Suryani, R. (2023). *Efektivitas kontra-propaganda digital dalam menangkal terorisme di media sosial*. Institut Teknologi Bandung.
- Tentara Nasional Indonesia. (2018). *Doktrin Tri Dharma Eka Karma*. Markas Besar TNI.
- Thompson, J. D. (1967). *Organizations in action*. McGraw-Hill.
- Widjojo, A. (2021). *Strategi pertahanan negara*. Gramedia.